

ABSTRAK

HARMONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN HUTAN YANG BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG

**Oleh
MUTAKIN**

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan di Provinsi Lampung serta menawarkan konsep harmonisasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam mencapai keberlanjutan pengelolaan hutan. Penelitian merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisis data penafsiran hukum yang berfokus pada penelaahan prinsip-prinsip hukum, norma, dan peraturan perundang-undangan terkait. Pendekatan ini dilakukan untuk menggali makna, tujuan, dan implikasi hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan hutan di Provinsi Lampung telah diarahkan pada prinsip keberlanjutan melalui regulasi, perencanaan tata hutan, dan program pelestarian lingkungan. Namun, efektivitasnya masih terbatas akibat tumpang tindih kewenangan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Konsep harmonisasi kebijakan menekankan penyelarasan regulasi nasional dan kebijakan lokal, integrasi perencanaan, sinkronisasi program, serta kolaborasi antarlevel pemerintahan. Harmonisasi ini diharapkan mampu mendukung pelestarian lingkungan, peningkatan ekonomi masyarakat sekitar hutan, dan keberlanjutan sumber daya alam secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi kebijakan, menyusun pedoman teknis bersama, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan agar pengelolaan hutan lebih efektif. Harmonisasi kebijakan yang terstruktur diharapkan mencegah tumpang tindih kewenangan, memperkuat partisipasi publik, serta menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan konservasi lingkungan, sekaligus mendukung pelestarian ekosistem dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Harmonisasi, Kebijakan Pemerintah, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan.

ABSTRACT

HARMONIZATION OF GOVERNMENT POLICIES IN SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT IN LAMPUNG PROVINCE

**By
MUTAKIN**

The purpose of this study is to analyze the policies of the central and regional governments in forest management in Lampung Province and to propose a concept for harmonizing these government policies in achieving sustainable forest management. This research is normative juridical in nature, using a legal interpretation data analysis method that focuses on the examination of legal principles, norms, and relevant legislation. This approach is carried out to explore the meaning, objectives, and legal implications relevant to the issues under study. The results of this study indicate that forest management in Lampung Province has been directed toward sustainability principles through regulations, forest planning, and environmental conservation programs. However, its effectiveness remains limited due to overlapping authorities, weak inter-agency coordination, and limitations in human resources and funding. The policy harmonization concept emphasizes the alignment of national regulations and local policies, integration of planning, synchronization of programs, and collaboration across government levels. This harmonization is expected to support environmental preservation, improve the economic welfare of communities around forests, and ensure the sustainable use of natural resources effectively. The study recommends that central and regional governments strengthen policy coordination, develop joint technical guidelines, and enhance institutional capacity to achieve more effective forest management. Structured policy harmonization is expected to prevent overlapping authorities, strengthen public participation, align economic development with environmental conservation, and support both ecosystem preservation and sustainable development in Lampung Province.

Keywords: *Harmonization, Government Policy, Sustainable Forest Management.*